



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUSUF BANGUN CAHYONO
2. Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
3. NHK : 738868

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 88.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/135 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000
2. Tanah Seluas 1785 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 917 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. Tanah Seluas 931 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 157.000.000

1. MOTOR, VARIO METIK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TERIOS MPNP / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 265.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 265.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.